

## Daftar Informasi Publik BPK RI

No.	Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Kategori Informasi				Satker yang Menguasai Informasi
			Setiap Saat	Berkala	Serta Merta	Dikecualikan	
1	Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Laporan Keuangan Badan/Lembaga lain yang mengelola Keuangan Negara/Daerah</li> <li>2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja;</li> <li>3. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;</li> <li>4. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.</li> </ol>		√			Auditorat Keuangan Negara I - VII
2	Informasi terkait proses pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut, penyelesaian kerugian negara	Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Kertas Kerja Pemantauan Tindak Lanjut, dan Kertas Kerja Penyelesaian Kerugian Negara;				√	Auditorat Keuangan Negara I - VII
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang belum diserahkan ke Lembaga Perwakilan					√	Auditorat Keuangan Negara I - VII
4	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) oleh BPK					√	Auditorat Keuangan Negara I - VII
5	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif					√	Auditorat Keuangan Negara I - VII
6	Laporan perhitungan kerugian negara dalam rangka memenuhi permintaan APH					√	Auditorat Keuangan Negara I - VII
7	Laporan/dokumen atau data-data entitas pemeriksaan yang diterima oleh BPK dari <i>auditee</i> yang diberikan atas dasar permintaan BPK					√	Auditorat Keuangan Negara I - VII
8	Dokumen hasil kajian internal BPK yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara					√	Auditorat Keuangan Negara I - VII
9	Lokasi penyimpanan KKP					√	Auditorat Keuangan Negara I - VII
10	Pengumuman pengadaan barang dan jasa, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di BPK			√			Sekretariat Jenderal

## Daftar Informasi Publik BPK RI

No.	Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Kategori Informasi				Satker yang Menguasai Informasi
			Setiap Saat	Berkala	Serta Merta	Dikecualikan	
11	Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L)			√			Sekretariat Jenderal
12	Profil Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi mengenai: domisili, alamat lengkap, Dasar Hukum, Visi dan Misi, Rencana Strategis, Sejarah BPK RI</li> <li>2. Profil Pimpinan BPK RI, Bidang Tugas Pimpinan BPK RI, Struktur Organisasi, Gambaran Umum Satuan Kerja, Fungsi dan Kedudukan Kantor Perwakilan BPK, Profil Singkat Pejabat Struktural</li> <li>3. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang telah di periksa, diverifikasi dan telah dikirmkan oleh KPK ke BPK untuk diumumkan</li> </ol>		√			Sekretariat Jenderal
13	Ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan oleh BPK pusat maupun perwakilan yang sifat nya internal maupun eksternal	Nama program, penanggung jawab dan pelaksana program, target dan/atau capaian program, jadwal pelaksanaan, anggaran program (sumber dan jumlah), agenda pelaksanaan tugas BPK, Informasi terkait hak-hak masyarakat		√			Sekretariat Jenderal
14	Ringkasan informasi tentang pencapaian kinerja BPK			√			Sekretariat Jenderal
15	Informasi tentang penerimaan calon pegawai negeri dan/atau Pejabat Publik Negara			√			Sekretariat Jenderal
16	Ringkasan laporan akses Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang di terima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan (sebagian atau seluruhnya) dan yang ditolak, alasan penolakan permohonan Informasi Publik		√			Sekretariat Jenderal
17	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi publik beserta pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi			√			Sekretariat Jenderal

## Daftar Informasi Publik BPK RI

No.	Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Kategori Informasi				Satker yang Menguasai Informasi
			Setiap Saat	Berkala	Serta Merta	Dikecualikan	
18	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat BPK maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari BPK			√			Sekretariat Jenderal
19	Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak					√	Sekretariat Jenderal
20	Informasi RKAKL dan DIPA beserta dokumen pendukung yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik					√	Sekretariat Jenderal
21	NPWP Pegawai					√	Sekretariat Jenderal
22	Rincian tagihan per-satker					√	Sekretariat Jenderal
23	Nomor rekening pegawai					√	Sekretariat Jenderal
24	Nomor rekening Pihak III					√	Sekretariat Jenderal
25	Jumlah pajak yang dipungut dan dibayarkan baik oleh pegawai maupun Pihak III					√	Sekretariat Jenderal
26	Laporan Keuangan un-audited					√	Sekretariat Jenderal
27	Management Letter KAP					√	Sekretariat Jenderal

## Daftar Informasi Publik BPK RI

No.	Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Kategori Informasi				Satker yang Menguasai Informasi
			Setiap Saat	Berkala	Serta Merta	Dikecualikan	
28	Topologi dan konfigurasi jaringan					√	Sekretariat Jenderal
29	<i>Private Internet Protocol (IP) address dan range IP address yang digunakan</i>					√	Sekretariat Jenderal
30	Konfigurasi infrastruktur <i>Data Center</i>					√	Sekretariat Jenderal
31	Sistem Keamanan Elektronik					√	Sekretariat Jenderal
32	Sistem Manajemen Basis Data ( <i>Database Management System</i> )					√	Sekretariat Jenderal
33	<i>Bandwidth Management</i>					√	Sekretariat Jenderal
34	<i>Source code</i> aplikasi					√	Sekretariat Jenderal
35	Konfigurasi aplikasi					√	Sekretariat Jenderal
36	Lokasi <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i>					√	Sekretariat Jenderal
37	Dokumen dan isi Rekam Medis					√	Sekretariat Jenderal
38	Hukuman Disiplin					√	Sekretariat Jenderal

### Daftar Informasi Publik BPK RI

No.	Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Kategori Informasi				Satker yang Menguasai Informasi
			Setiap Saat	Berkala	Serta Merta	Dikecualikan	
39	Hasil assessment					√	Sekretariat Jenderal
40	Mekanisme Penilaian Perekrutan					√	Sekretariat Jenderal
41	Risalah Baperjakat					√	Sekretariat Jenderal
42	Informasi kesehatan psikis					√	Sekretariat Jenderal
43	Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai					√	Sekretariat Jenderal
44	Database SISDM					√	Sekretariat Jenderal
45	Lokasi penyimpanan arsip pegawai					√	Sekretariat Jenderal
46	Dokumen hasil Rapat dan Sidang Badan					√	Sekretariat Jenderal
47	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa					√	Sekretariat Jenderal
48	Dokumen Rincian Harga Perhitungan Sendiri (HPS)					√	Sekretariat Jenderal

## Daftar Informasi Publik BPK RI

No.	Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Kategori Informasi				Satker yang Menguasai Informasi
			Setiap Saat	Berkala	Serta Merta	Dikecualikan	
49	Evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh KAP beserta hasil pemeriksaannya yang telah disampaikan kepada DPRD, DPD dan DPRD			√			Sekretariat Jenderal
50	Proses evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh KAP					√	Sekretariat Jenderal
51	Laporan Keuangan	Rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan CaLK serta daftar aset dan inventasi	√				Sekretariat Jenderal
52	Daftar Informasi Publik	Berisi; nomor, ringkasan isi informasi, pejabat/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyampaian atau retensi arsip		√			Sekretariat Jenderal
53	Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan BPK yang telah disahkan dan ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan</li> <li>2. Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang telah diterbitkan</li> </ol>	√				Ditama Binbangkum
54	Data dan dokumen berisi informasi terkait dengan proses pemeriksaan dalam rangka Tuntutan Perbendaharaan beserta dokumen pendukung dalam rangka penetapan ganti rugi terhadap bendahara (sampai dinyatakan habis jangka waktu pengecualiannya oleh PPID)					√	Ditama Binbangkum
55	Data dan dokumen berisi informasi terkait dengan proses pemeriksaan dalam rangka Tuntutan Perbendaharaan beserta dokumen pendukung dalam rangka penetapan ganti rugi terhadap bendahara (yang telah dinyatakan habis waktu pengecualiannya oleh PPID)			√			Ditama Binbangkum

## Daftar Informasi Publik BPK RI

No.	Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Kategori Informasi				Satker yang Menguasai Informasi
			Setiap Saat	Berkala	Serta Merta	Dikecualikan	
56	Laporan Pendampingan proses Hukum Pidana terhadap Pelaksana BPK					√	Ditama Binbangkum
57	Laporan pendampingan keterangan ahli Pemeriksa BPK atas perhitungan kerugian negara					√	Ditama Binbangkum
58	Hasil analisa hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan, proses evaluasi, LHP, serta evaluasi BPK	berisi/memuat informasi: 1. rahasia negara, 2. hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan fraud forensic, dan 3. informasi publik yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dikecualikan untuk dipublikasikan.				√	Ditama Binbangkum
59	Hasil analisa hukum yang berkaitan dengan konsep atau pedoman pemeriksaan	berisi/memuat informasi: 1. rahasia negara, 2. hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan <i>fraud forensic</i> , dan 3. informasi publik yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dikecualikan untuk dipublikasikan.				√	Ditama Binbangkum
60	Dokumen yang terkait dengan LHP BPK mengandung unsur tindak pidana	berisi/memuat informasi: 1. Data LHP BPK berunsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang, 2. Data Tindak Lanjut Penanganan Kasus oleh instansi yang berwenang, dan 3. Kompilasi data LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang dan tindak lanjutnya.				√	Ditama Binbangkum
61	Hasil pendapat hukum atas permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang diminta oleh pelaksana BPK dan dokumen pendukung (sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)					√	Ditama Binbangkum
62	Memorandum atau surat-surat antara BPK dengan Badan Publik lainnya atau disposisi dan nota dinas internal BPK yang menurut sifatnya dirahasiakan					√	Ditama Binbangkum

## Daftar Informasi Publik BPK RI

No.	Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Kategori Informasi				Satker yang Menguasai Informasi
			Setiap Saat	Berkala	Serta Merta	Dikecualikan	
63	Rencana Strategis BPK		√				Ditama Revbang
64	Pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman, standar, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur operasional standar, dan seri panduan yang berlaku di lingkungan BPK (produk hukum BPK yang sifatnya mengatur ( <i>regelling</i> ) internal BPK					√	Ditama Revbang
65	Rencana Kerja (Renja)					√	Ditama Revbang
66	Rencana Kerja Tahunan (RKT)					√	Ditama Revbang
67	Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)					√	Ditama Revbang
68	Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP)					√	Ditama Revbang
69	Laporan Kegiatan Pelaksana BPK (triwulanan)					√	Ditama Revbang
70	Seluruh Laporan Hasil Pengawasan/Kegiatan ITAMA					√	Inspektorat Utama